

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Kajian Pemberdayaan Perempuan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan**

Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh kekuatan atau memiliki daya/ kekuatan. Meriam Webster dalam *oxford English Dictionary* (dalam Maryani 2019, hlm.1) mengartikan *empowerment* dalam dua arti yaitu:

- 1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu
- 2) *To give power of authority to*, yang memberi kekuasaan atau kewenangan.

Menurut Totok Mardikanto (2017) dalam Rilfiyanti (2019, hlm.27) istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok maupun masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya sehingga dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosialnya, dll.

Menurut Dadang Nurmada (2004) dalam Marmoah (2014, hlm.57), pemberdayaan ialah memfasilitasi masyarakat agar dapat memahami masalah yang tengah mereka hadapi, kemudian mencoba merencanakan berbagai kegiatan yang mereka yakini sebagai pilihan yang mereka inginkan dan dapat mereka wujudkan dengan menggunakan berbagai potensi dan sumber yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Pemberdayaan dalam hal ini mendorong masyarakat untuk memahami dan mengenali masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungannya, sehingga masyarakat nantinya diharapkan bisa mandiri dan mampu bertahan hidup di lingkungannya.

Winarni dalam Maryani (2019, hlm.1) mengatakan bahwa hakikat pemberdayaan menyangkut tiga hal yaitu: pengembangan (enabling), penguatan potensi atau kekuatan, dan penciptaan kemandirian.

#### **2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan**

Menurut Mardikanto (2015) dalam Maryani (2019, hlm. 8), memiliki enam tujuan pemberdayaan yaitu:

##### **1) Perbaikan Kelembagaan**

Penyempurnaan inisiatif yang dilaksanakan bertujuan untuk perbaikan kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Institusi yang baik mendorong orang untuk bergabung dengan institusi yang ada sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini, tujuan departemen mudah dicapai. Suatu tujuan yang telah disepakati oleh semua anggota dalam lembaga mudah direalisasikan. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

##### **2) Perbaikan usaha**

Setelah kelembagaan di perbaiki, maka diharapkan akan mempengaruhi kenaikan bisnis dan fasilitas, sehingga dapat memuaskan semua anggota lembaga dan memberikan manfaat menyeluruh bagi semua orang di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

##### **3) Perbaikan pendapatan**

Peningkatan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan seluruh anggota lembaga. Dengan kata lain peningkatan usaha diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

#### 4) Perbaiki lingkungan

Peningkatan pendapatan memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial”, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan rendah. Sebagai contoh, suatu kawasan menurut ketentuan pengetahuan yang berkembang harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 40%. Hal itu berarti masyarakat diharapkan tidak semena-mena melakukan penebangan pohon yang bisa menyebabkan banjir atau longsor. Dengan demikian kondisi lingkungan fisik akan tetap terjaga. Contoh lainnya, sebuah pabrik yang dimiliki oleh seorang pengusaha hendaknya memperhatikan pembuangan limbah pabrik yang didapat dari hasil produksi barang yang diproduksinya. Dalam kaitan ini pengusaha tersebut harus bertanggung jawab untuk tidak membuang limbah ke sungai atau jalan yang bisa menyebabkan tanah ataupun air sekitar pabrik tersebut tercemar oleh zat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itulah pendapatan masyarakat harus memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan akan terjadi, karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

#### 5) Perbaiki kehidupan

Standar hidup masyarakat perkotaan dapat diukur dengan berbagai indikator dan faktor yang berbeda. Termasuk status kesehatan setiap rumah tangga, tingkat Pendidikan, pendapatan atau tingkat daya beli. Dengan meningkatnya pendapatan, kondisi lingkungan yang lebih baik juga harus tercermin dalam korelasinya. Pendapatan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih baik pada akhirnya akan meningkatkan kondisi kehidupan bagi semua keluarga dan masyarakat.

#### 6) Perbaiki masyarakat

Jika setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, akan ada sekelompok orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti mendukung lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, dan dalam hal ini diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

### 2.1.1.3 Proses Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto dalam Santi (2019, hlm. 36) proses pemberdayaan ada 5, yaitu:

- 1) Pemungkinan: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat,
- 2) Penguatan: melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka,
- 3) Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan,
- 5) Pemeliharaan: dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

#### 2.1.1.4 Prinsip Pemberdayaan

Untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan, empat prinsip harus di perhatikan :

##### 1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dianut dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah kesetaraan atau kesamaan status baik laki-laki maupun perempuan antara masyarakat dan lembaga pelaksana program pemberdayaan masyarakat. Dinamisme membangun hubungan yang setara dengan mengembangkan mekanisme untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

##### 2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang mendorong swasembada masyarakat bersifat partisipatif, dengan program yang direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dianalisis oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

##### 3) Prinsip Kemandirian atau Independensi

Prinsip kemandirian menghargai kemampuan masyarakat dan mengutamakan dukungan dari pihak lain. Konsep ini melihat orang miskin bukan sebagai objek yang tidak memiliki keterampilan "*the have not*", tetapi sebagai subjek yang memiliki sedikit keterampilan "*the have little*". Mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui batas-batas yang tepat dari bisnis mereka,

mengetahui lingkungan mereka, memiliki pekerjaan dan kemauan, dan memiliki norma sosial yang telah lama terbentuk. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut : “Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya”. Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak tergantung kepada pihak mana pun.

#### 4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang secara berkelanjutan, meskipun peran mitra pada awalnya lebih dominan dibandingkan masyarakat itu sendiri. Peran mitra perlahan tapi pasti akan berkurang dan akhirnya hilang seiring masyarakat mendapatkan kendali atas aktivitas mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, program ini dapat membawa pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada seluruh peserta program pemberdayaan. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

#### **2.1.1.5 Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Moulton dalam Prijono & Prijoko dalam Marmoah (2014, hlm. 66) pemberdayaan perempuan sering diartikan sebagai pemerataan kekuasaan yang mendorong kesadaran dan partisipasi perempuan di semua lapisan masyarakat. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan gagasan pemberdayaan perempuan untuk aktualisasi diri guna meningkatkan kehadirannya di masyarakat.

Menurut Kreisber intisari pemberdayaan perempuan dalam Anwar dalam Marmoah (2014, hlm.66) adalah: kita mulai dengan mempertimbangkan manfaat emansipasi yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam pembangunan

bersama. Kedua, proses yang melibatkan individu atau komunitas dalam proses pencerahan, penyadaran, organisasi kolektif dan manajemen kapasitas, memungkinkan mereka untuk menjadi peserta yang penting dan efektif dalam masyarakat. Menurut Hubeis dalam Saugi (2015, hlm.3) pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan dalam pembangunan nasional serta peran dan kemandirian organisasi perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*), agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi. Pendapatan menjadi menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri.

Menurut Hasanah (2013, hlm.75) Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*), agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi. Pendapatan menjadi menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri.

#### **2.1.1.6 Konsep Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Harry (2022, hlm.2) pemberdayaan adalah perubahan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki pada level tertentu seperti keluarga, masyarakat hingga negara. Disini perempuan dikatakan mempunyai posisi yang baik jika mampu melakukan apapun secara mandiri dan mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan terkait kehidupannya. Dengan diterapkannya pemberdayaan perempuan ini, dianggap sebagai strategi yang sangat penting untuk

meningkatkan peran perempuan sehingga bisa meningkatkan potensi yang dimiliki. Saat ini kesadaran masyarakat terkait peran perempuan sudah semakin berkembang pesat. 415936

Pemberdayaan perempuan ini mempunyai dua ciri khusus. Pertama yaitu pemberdayaan perempuan sebagai refleksi kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan secara kolektif. Sebagai partisipasi aktif tentu dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk bisa menjadi lebih berguna. Maksudnya, keterlibatan ini menunjukkan jika perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk berkembang sendiri. Ciri kedua yaitu sebagai pelibatan perempuan dalam proses pengorganisasian. Lebih jelasnya agar perempuan mendapatkan posisi yang strategis. Permulaan mungkin dibutuhkan untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan organisasi yang berperan sebagai perencana, pelaksana hingga monitoring. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan ini juga akan semakin meningkat dan diiringi dengan kemampuan yang dimiliki.

Meningkatkan pengaruh perempuan, termasuk organisasi perempuan, sangat penting dan selalu penting untuk menang melalui kerja yang komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Ada banyak inisiatif yang dapat diambil secara kolektif untuk memberdayakan perempuan. Organisasi dapat digunakan sebagai wahana untuk memediasi wacana gender, termasuk partisipasi politik perempuan. Perempuan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperjuangkan hak-hak yang terabaikan melalui kegiatan organisasi.

Visi dari pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Misi kami untuk memberdayakan perempuan meliputi:

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Promosi sosialisasi kesetaraan dan keadilan
3. Penghapusan segala bentuk penindasan terhadap perempuan
4. Implementasi Hak Asasi Perempuan (HAM)
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

6. Kapasitas dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan yang lebih besar.

#### **2.1.1.7 Kebijakan Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Kabeer dalam Sulfiana (2019, hlm.36) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesejahteraan (*Welfare*). Aspek ini dapat dikatakan sebagai salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Menurut Claros and Zahidi kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur, yaitu *pertama*, partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting yang tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan melainkan sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. *Kedua*, pencapaian pendidikan merupakan aspek yang fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, dapat memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak akan mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik. *Ketiga*, kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi dan mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang. Amartya Sen (dalam Claros and Zahidi) menyatakan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai lingkungan mereka dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya berhenti pada meningkatkan jumlah perempuan bekerja, melainkan pada kesetaraan dalam pemberian upah.
- 2) Akses (*Acces*). Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak, akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit,

pelatihan, 38 fasilitas, pemasaran, tenaga kerja dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya, melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial mereka dan memengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal, tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termajinalisasi dari komunitasnya, negaranya dan bahkan dunia.

- 3) Konsientisasi (*Consientisation*). Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.
- 4) Partisipasi (*Participation*). Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan memengaruhi masyarakat mereka.
- 5) Kesetaraan Dalam Kekuasaan (*Equality of Control*). Kesetaraan dalam kekuasaan dalam kekuasaan atas faktor produksi dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan. Kesejahteraan, akses, konsientisasi, partisipasi dan kesetaraan dalam kekuasaan, merupakan unsur-unsur dari pemberdayaan perempuan yang tidak hanya merupakan wacana atau konsep, namun harus diaplikasikan dengan baik dan benar, sehingga diharapkan perempuan dapat memajukan, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dirinya.

Kesejahteraan, akses, konsientisasi, partisipasi dan kesetaraan dalam kekuasaan, merupakan unsur-unsur dari pemberdayaan perempuan yang tidak hanya merupakan wacana atau konsep, namun harus diaplikasikan dengan baik dan benar, sehingga diharapkan perempuan dapat memajukan, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dirinya. Pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai situasi dimana mayoritas perempuan dapat berkembang secara mandiri, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya domestik atau publik, memiliki kesempatan, dan menikmati “pilihan” kekuasaan. Kemudian, menurut Hubeis hlm 127 pemberdayaan perempuan adalah tentang:

1. Meningkatkan status dan kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mampu mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
2. Melanjutkan upaya peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan, menjaga kesatuan nilai dan nilai sejarah dalam perjuangan perempuan, serta memperkuat kesejahteraan perempuan, keluarga dan sosial.

#### **2.1.1.8 Jenis Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Anwar (2007) dalam Rilfiyanti (2019, hlm.32) terdapat dua jenis pemberdayaan perempuan diantaranya:

1. Pemberdayaan perempuan dalam perspektif gender

Kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam perspektif gender telah disadari oleh pemerintah sejak tahun 1980. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui program yang khusus diperuntukan bagi perempuan untuk mengejar ketinggalannya, pengintegrasian peranan, kepentingan dan aspirasi perempuan dalam program umum.

2. Pemberdayaan perempuan melalui pembelajaran

Salah satu penyebab ketidakberdayaan masyarakat adalah tidak terjangkau sistem pendidikan dan kurang berkembangnya pendidikan luar sekolah yang ada diantara mereka. Oleh sebab itu sangat didambakan akan potensi alam sekitar untuk memberdayakan masyarakat. Pendidikan melalui pendidikan luar sekolah memfokuskan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok dan menekankan pada proses objektif seperti penguasaan pengetahuan dan keterampilan.

#### **2.1.1.9 Tujuan Pemberdayaan Perempuan**

Nugroho (2008) dalam Rilfiyanti (2019, hlm.33) mengatakan dalam program pemberdayaan perempuan tentu memiliki suatu tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai partisipasi aktif (subjek) dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap

pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha rumah tangga, industri kecil, maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

#### **2.1.1.10 Indikator- Indikator Pemberdayaan Perempuan**

Nugroho (2008) dalam Rilfiyanti (2019, hlm.34) mengatakan ada empat indikator pemberdayaan perempuan diantaranya :

1. Akses adalah kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif didalam lingkungannya
2. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas
3. Kontrol ialah bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya yang ada
4. Manfaat ialah bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atas pembangunan secara sama dan setara.

#### **2.1.2 Kajian Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber)**

##### **2.1.2.1 Pengertian Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber)**

Teknik “Budikdamber” pertama kali ditemukan oleh dosen dari Fakultas Budidaya Perikanan dari Politeknik Negeri Lampung, Juli Nursandi. Teknik ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak terlalu luas. (Susetya dalam Saputri 2020, hlm.105). Melalui teknik budidaya semacam ini juga mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga, hal ini disebabkan masyarakat tidak hanya melakukan budidaya ikan lele namun juga bercocok tanam secara akuaponik. Teknik Budikdamber tidak hanya menggunakan ikan lele saja, namun juga dapat

menggunakan ikan yang memiliki karakteristik tahan dengan oksigen rendah seperti nila hitam, patin, sepat, gabus dan gurami. Dalam usaha budidaya ikan, kualitas air merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Ikan lele termasuk ikan yang tahan terhadap kualitas air yang minim atau kualitas air yang kurang baik bahkan ikan lele dapat hidup pada kondisi oksigen yang sangat rendah, hal ini disebabkan karena ikan lele mempunyai alat bantu pernapasan berupa *arborescent* yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara.

Menurut Suryanti (2020) Budikdamber atau budidaya ikan dalam ember merupakan model hidroganik yang sederhana. Sistem ini menggunakan ember untuk budidaya ikan dan sayuran yang ditanam di atasnya dengan memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk atau pakan tanaman. Sistem ini membantu memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati serta mendorong konsumsi ikan dan sayuran. Modal yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya ikan dalam ember (budikdamber) terbilang murah. Peralatan yang diperlukan juga mudah didapat dan bisa dilakukan di area terbatas, seperti pekarangan rumah.

### 2.1.2.2 Langkah-langkah Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber)



Gambar 2.1 Media Ember Budikdamber

Langkah-langkah yang harus dilakukan:

- 1) Siapkan alat dan bahan yang sudah jadi, selesaikan pemasangan ember plastik yang berukuran 80 liter, dan gunakan solder untuk melubangi bagian bawah. Selanjutnya pasang kran sebagai saluran air (water treatment).
- 2) Gelas air mineral yang sudah diberi lubang dan dipasang melingkar di ujung ember dengan menggunakan kawat spiral yang telah disediakan untuk sistem akuaponik.
- 3) Melakukan persiapan media air kurang lebih 60 liter yang diendapkan terlebih dahulu selama dua hari dengan menambahkan prebiotik ke dalam air untuk menumbuhkan mikroba yang dapat mengurai kotoran ikan lele agar air tidak mudah berbau dan keruh. Pemberian prebiotik dilakukan satu kali dalam seminggu. Kemudian batang atau benih kangkung diletakkan kedalam wadah cup yang telah siap, dengan cara meletakkan arang sebagai penunjang batang kangkung, atau dapat dimulai dari benih kangkung. Namun, lama panen akan berbeda pada keduanya, batang kangkung siap dipanen selama kurang lebih 14 hari, sedangkan untuk benih akan lebih lama. Kotoran ikan lele juga berperan sekaligus menjadi pupuk bagi tanaman kangkung.
- 4) Benih lele siap ditambahkan ke media air yang telah disiapkan dengan memilih benih lele berukuran 7-8 cm jika pH memenuhi standar hidup lele 7 atau lebih.
- 5) Pelihara pakan pelet lele tiga kali sehari pada pagi, siang dan sore hari. Selain itu, jika air menjadi keruh dan berbau gantilah air secara teratur.
- 6) Pisahkan ikan lele yang terinfeksi jamur berdasarkan ukurannya untuk mencegah ikan lele yang sehat terinfeksi. Ikan lele adalah hewan kanibal, jadi pisahkan menurut ukurannya agar tidak mengurangi jumlah ikan lele.
- 7) Ikan lele paling baik dipanen sekitar 2 bulan setelah lahir, dan kangkung juga bisa dipanen saat ini.

### **2.1.2.3 Keunggulan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber)**

Menurut Habiburahman (2018) dalam Febri (2019) keunggulan budikdamber antara lain:

- 1) Hemat air.

Sistem akuaponik adalah ekosistem yang sangat hemat air antara ikan dan tanaman. Meskipun jumlah air terus menurun, namun tetap relatif rendah karena penguapan dan konsumsi air oleh tumbuhan. Air ditambahkan ke ketinggian air yang ditentukan seminggu sekali.

#### 2) Bebas limbah

Dalam sistem penangkapan ikan perlu dibersihkan dari limbah ikan dan sisa makanan. Jika dibiarkan akan membentuk amonia yang dapat meracuni ikan. Dalam sistem akuaponik, air dan limbah makanan tidak terbuang percuma dan semuanya dapat di daur ulang, karena mikroorganisme mengubah limbah pembawa air menjadi nutrisi yang membantu pertumbuhan tanaman.

#### 3) Mudah dirawat

Dalam sistem penangkapan ikan tradisional, memelihara ikan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit sehari, dan kolam perlu dikosongkan dan dibersihkan secara teratur. Sedangkan pada akuaponik tidak membutuhkan banyak energi untuk pemeliharaan, cukup mengecek suhu, pH, kadar ammonia, pembersihan bagian-bagian sistem, dll. Setiap 3-4 hari sekali sudah cukup.

#### 4) Tanpa bahan kimia

Tanaman dalam sistem akuaponik tidak menggunakan pupuk kimia selama pertumbuhan dan ikan sistem tidak membutuhkan unsur kimia selama budidaya. Akuaponik menggunakan kotoran ikan atau kotoran ternak sebagai pupuk tanaman, pertumbuhan tanaman menjadi alami dan tanaman akuaponik terjamin tanpa bahan kimia.

### **2.1.3 Kajian Pemenuhan Gizi Keluarga**

#### **2.1.3.1 Pengertian Ilmu Gizi**

Menurut Adriani (2012, hlm.239) ilmu gizi (*nutrition science*) adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Ilmu pengetahuan tentang gizi (nutrisi) membahas sifat-sifat nutrien (zat gizi) yang terkandung dalam makanan, pengaruh metaboliknya, serta akibat yang ditimbulkan bila terdapat kekurangan (ketidakcukupan) zat gizi. Zat gizi adalah senyawa kimia yang terkandung dalam makanan yang pada gilirannya

diserap dan diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, dan mengatur proses kehidupan.

Status gizi menurut Adriani (2012, hlm.239) merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Secara klasik, gizi tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja tetapi juga berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Di Indonesia dihubungkan dengan upaya untuk memacu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

### **2.1.3.2 Fungsi Zat Gizi**

Fungsi zat gizi menurut Adriani (2012, hlm.239) adalah sebagai berikut:

1. Memberi energi
  - a. Zat gizi yang memberikan energi adalah karbohidrat, protein dan lemak dengan melalui proses oksidasi
  - b. Karbohidrat, protein dan lemak paling banyak dalam bahan makanan.
2. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh
  - a. Jaringan tubuh terbuat dari protein, mineral dan air.
  - b. Diperlukan untuk membentuk sel-sel baru dan memelihara mengganti sel-sel yang rusak.
3. Mengatur proses tubuh
  - a. Terdiri dari protein, mineral, vitamin dan air.
  - b. Protein digunakan untuk keseimbangan air dalam sel dan sebagai antibody (penangkal organisme yang infeksiif dan bahan makanan asing yang masuk dalam tubuh)
  - c. Mineral dan vitamin digunakan untuk pengatur proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot, serta proses lain termasuk pertumbuhan dan penuaan.
  - d. Air digunakan untuk melarutkan bahan-bahan dalam tubuh seperti darah, cairan pencernaan dan jaringan, mengatur suhu tubuh, mengatur peredaran darah, dan mengatur pembuangan sisa-sisa (ekskresi).

### **2.1.3.3 Status Gizi**

Menurut Robinson & Weighley dalam Adriani (2012, hlm.242) status gizi adalah keadaan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan makanan oleh tubuh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi, yaitu:

1. Faktor langsung
  - a. Asupan berbagai makanan
  - b. Penyakit
2. Faktor tidak langsung
  - a. Ekonomi keluarga, penghasilan keluarga merupakan faktor yang memengaruhi kedua faktor yang berperan langsung terhadap status gizi.
  - b. Produksi pangan, peranan pertanian dianggap penting karena kemampuannya menghasilkan produk pangan.
  - c. Budaya, masih ada kepercayaan untuk memandang makanan tertentu yang dipandang dari segi gizi sebenarnya mengandung zat gizi yang baik.
  - d. Kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan yang jelek akan memudahkan anak menderita penyakit tertentu seperti ISPA, infeksi saluran pencernaan.
  - e. Fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting untuk menyokong status kesehatan dan gizi anak.

### **2.1.3.4 Ketahanan Pangan**

Dalam Dokumen Kebijakan Umum tentang Ketahanan Pangan 2006 – 2009 (hlm. 59-71) ketahanan pangan pada dasarnya tercapai ketika dua dimensi terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama adalah mampu menyediakan pangan yang cukup dan adil bagi seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk akan memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup gizi agar dapat hidup sehat dan produktif setiap hari.

Ketahanan pangan rumah tangga merupakan tonggak ketahanan pangan masyarakat dan pilar ketahanan pangan lokal dan nasional. Berdasarkan pemahaman ini, salah satu prioritas utama dalam mengembangkan ketahanan

pangan adalah membantu masyarakat memenuhi tantangan gizi mereka sendiri dan mencapai ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, hasil dan pendapatan melalui pertanian dan usaha lainnya. Peningkatan pendapatan meningkatnya daya beli dan meningkatnya fleksibilitas dalam memilih makanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan gizinya.

Pedoman pengembangan ketahanan pangan dalam Dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009 (hlm. 59-71) adalah sebagai berikut:

- 1) Dari sisi penawaran, kebijakan ketahanan pangan bertujuan untuk:
  - a. Memperbaiki lingkungan, sumber daya alam dan kualitas air.
  - b. Menjamin kelangsungan produksi pangan, terutama produksi dalam negeri.
  - c. Mengembangkan kemampuan mengelola pangan negara dan lokal.
  - d. Meningkatkan kapasitas produktif negara dengan mengalokasikan lahan abadi untuk produksi pangan.
- 2) Dalam hal distribusi, kebijakan ketahanan pangan ditujukan kepada:
  - a. Memperbaiki sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi usaha, seperti mengurangi kerugian akibat pembusukan pangan dan distribusi yang tidak efisien.
  - b. Pengurangan dan/atau penghapusan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah.
  - c. Membangun fasilitas pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan dan penciptaan nilai.
- 3) Dalam aspek konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:
  - a. Menjamin kuantitas dan kualitas yang memadai, nutrisi yang aman dan gizi seimbang untuk semua rumah tangga.
  - b. Mempromosikan, mengembangkan, membina dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi hak atas pemenuhan pangan.
  - c. Membangun jaringan kelembagaan masyarakat untuk mewujudkan hak atas pangan

- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan atau sumber pangan tambahan bagi kelompok masyarakat tertentu (kelompok miskin, ibu hamil, anak kurang gizi, dsb)

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan pada tingkat mikro atau rumah tangga dan individu serta pada tingkat makro atau nasional.

### **2.1.3.5 Konsep Ketahanan Pangan**

Konsep ketahanan pangan dalam UU No. 7 Tahun 1996 tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi rumah tangga. Berdasarkan konsep tersebut, ada beberapa prinsip yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan ketahanan pangan (*food security*) yang perlu diperhatikan (Sumardjo, 2006 dalam Purwaningsih 2008 hlm.2):

1. Rumah tangga merupakan unit pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional, masyarakat dan perorangan.
2. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.
3. Ketersediaan pangan mencakup aspek ketercukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*).
4. Produksi pangan yang sebagai suatu proses produksi, pembuatan, pengolahan, penyiapan, pengawetan, pengemasan, pengemasan kembali dan/atau pangan, sangat menentukan jumlah pangan.
5. Keamanan pangan (*food safety*) adalah persyaratan dan upaya untuk mencegah potensi pencemaran pangan dengan bahan biologi, kimia dan lainnya yang mempengaruhi kehidupan manusia, serta terjaminnya mutu makanan (*food quality*) yaitu pemenuhan standar nutrisi dan standar komersial bahan makanan dan minuman.
6. Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara melalui system distribusi produksi pangan yang dikembangkan. Prinsip pemerataan pangan mengamanatkan

system pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali.

7. Distribusi makanan yang merata: sistem distribusi pangan yang menjaga ketersediaan pangan setiap saat dan teratur.
8. Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan.

Konsep ketahanan pangan seperti yang telah disebutkan diatas, dapat diringkas kedalam aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan: Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk.
2. Keamanan pangan: pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
3. Kemerataan pangan: sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata. Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat.
4. Keterjangkauan pangan: kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas rumah tangga terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan.

### 2.1.3.2 Permasalahan Dalam Ketahanan Pangan

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:

#### 1. Penyediaan Pangan

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan: (1) terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian, (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, (3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan, (4) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan, dan (5) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman (Nainggolan, 2006 dalam Purwaningsih 2008, hlm.15).

Secara rinci faktor penyebab terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis dan sosial ekonomi sebagai berikut: (Purwaningsih 2008, hlm.15)

#### a. Faktor teknis

- 1) Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1%/tahun.
- 2) Produktifitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat.
- 3) Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.
- 4) Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.

- 5) Tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).
  - 6) Kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir.
- b. Faktor sosial-ekonomi:
- 1) Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
  - 2) Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani dengan lahan produksi yang semakin sempit.
  - 3) Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
  - 4) Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
  - 5) Terbatasnya devisa untuk impor pangan.

## 2. Distribusi Pangan

Soetrisno (2005) dalam Purwaningsih (2008, hlm.16) mengatakan distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan pangan dari point of production (petani produsen) kepada point of consumption (konsumen akhir). Distribusi tidak hanya menyangkut distribusi pangan di dalam negeri namun juga menyangkut perdagangan internasional dalam suatu sistem harga yang terintegrasi secara tepat. Dengan demikian perlu dibuat pola distribusi pangan yang menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Permasalahan dalam distribusi pangan menurut Nainggolan (2006) dalam Purwaningsih (2008, hlm.16) sebagai berikut:

- a. Prasarana distribusi darat dan antar pulau yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan pasokan pangan pada waktu-waktu tertentu. Keadaan ini menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, baik secara fisik, namun juga secara ekonomi, karena kelangkaan pasokan akan memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat.

- b. Kelembagaan pemasaran belum mampu berperan, baik sebagai penyangga kestabilan distribusi maupun harga pangan. Pada masa panen, pasokan pangan berlimpah ke pasar sehingga menekan harga produk pertanian dan mengurangi keuntungan usahatani. Sebaliknya pada masa paceklik atau masa dimana panen tidak berhasil, harga meningkat dengan tajam, sehingga mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- c. Bervariasinya kemampuan produksi antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola system distribusi pangan, agar pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah konsumen.
- d. Keamanan jalur distribusi dan adanya pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.

#### 4. Konsumsi Pangan

Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun konsumsi protein sudah mencukupi). Konsumsi energi penduduk Indonesia masih lebih rendah. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai konsumsi energi yang sebagian besar dari padi-padian, dan bias ke beras. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mendiversifikasikan konsumsi pangan dengan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein, menganekaragamkan kualitas konsumsi pangan dengan menurunkan konsumsi beras per kapita, selain mengembangkan industri dan bisnis pangan yang lebih beragam.

#### **2.1.3.7 Strategi dan Kebijakan Ketahanan Pangan**

Kebijakan pangan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 mengenai ketahanan pangan, yang secara garis besar mengatur:

##### 1. Ketersediaan pangan

Dilakukan dengan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan lahan produktif.

##### 2. Cadangan pangan nasional

Berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah (dari tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi sampai pemerintah pusat). Selanjutnya cadangan masyarakat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan atau perorangan.

### 3. Penganekaragaman pangan

Konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gizi yang seimbang.

### 4. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan

Suatu langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan (kelebihan/kekurangan pangan dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan).

### 5. Peran pemerintah daerah dan masyarakat

Pemerintah daerah melaksanakan jakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing melalui pemberian informasi dan pendidikan, meningkatkan motivasi masyarakat dan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya peran masyarakat dalam ketahanan pangan dilakukan melalui kegiatan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, serta cadangan pangan.

### 6. Pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan/ pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu dan teknologi di bidang pangan, serta penyuluhan pangan. Kerjasama internasional meliputi bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan; cadangan pangan; pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.

## **2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan**

- a. Sri Suryanti, dkk tahun 2020 dengan judul Pemberdayaan Pertanian Organik Dengan Model Hidrokanik Budikdamber Di Era Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Bantul DIY. Fokus penelitiannya yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan dalam ember (budikdamber) meliputi proses penyuluhan, pelatihan dan pendampingan secara daring. Metode pendekatannya dilakukan dengan cara melakukan

pendampingan secara berkala yang meliputi: (1) identifikasi permasalahan yang dihadapi Dasawisma Dahlia melalui kuisioner dan interview. (2) penjelasan dan praktik cara budikdamber secara tepat yang meliputi persiapan bahan tanam, pembuatan instalasi, praktik budidaya tanaman dengan budikdamber, pemeliharaan dan pemanenan. Penjelasan dilakukan melalui video dan tatap muka dengan mematuhi protokol Covid-19. (3) pendampingan secara daring menggunakan media aplikasi whatsapp group. Dengan adanya kegiatan ini pengetahuan warga tentang budikdamber meningkat yang dibuktikan dengan keberhasilan warga dalam memproduksi sayur dan ikan menggunakan metode budikdamber dan juga masyarakat memiliki sumber penghasilan tambahan yang tidak hanya di bidang pertaniannya saja tetapi bidang perikanan pun bisa di dapatkan.

- b. Oleh Wahyu Tjiptaningsih tahun 2017 dengan judul Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan Di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui strategi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan sudah dilakukan dengan baik dan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi hal ini terlihat dari rata-rata pendapatan dari 15.200 menjadi 20.000 perorang.
- c. Suri Purnama Febri, dkk tahun 2019 dengan judul Pelatihan Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember) di Desa tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pendekatan secara langsung, ceramah dan praktik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan kelompok perikanan di Desa Tanah Terban mengenai keunggulan budikdamber dan akuaponik.
- d. Oleh Hafidz Maulana Muttaqin dan Abrista Devi tahun 2020 dengan judul Membangkitkan Perekonomian Warga Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Cara Budikdamber Ikan Lele dan Akuaponik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana warga Desa Puspasari Kecamatan

Citeureup Kabupaten Bogor melaksanakan Budikdamber sebagai salah satu peluang usaha dan menambah penghasilan di tengah masa pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi atau pengamatan dan interview atau wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Budikdamber merupakan metode budidaya ikan dalam ember yang dapat dilakukan di lahan yang kecil, tidak terlalu luas serta cara perawatannya tidak sulit dan tidak bergantung pada kondisi cuaca yang berubah-ubah, sehingga cocok digunakan di area manapun. Dan kegiatan ini dijadikan sebagai peluang untuk membantu sektor perekonomian masyarakat khususnya di Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

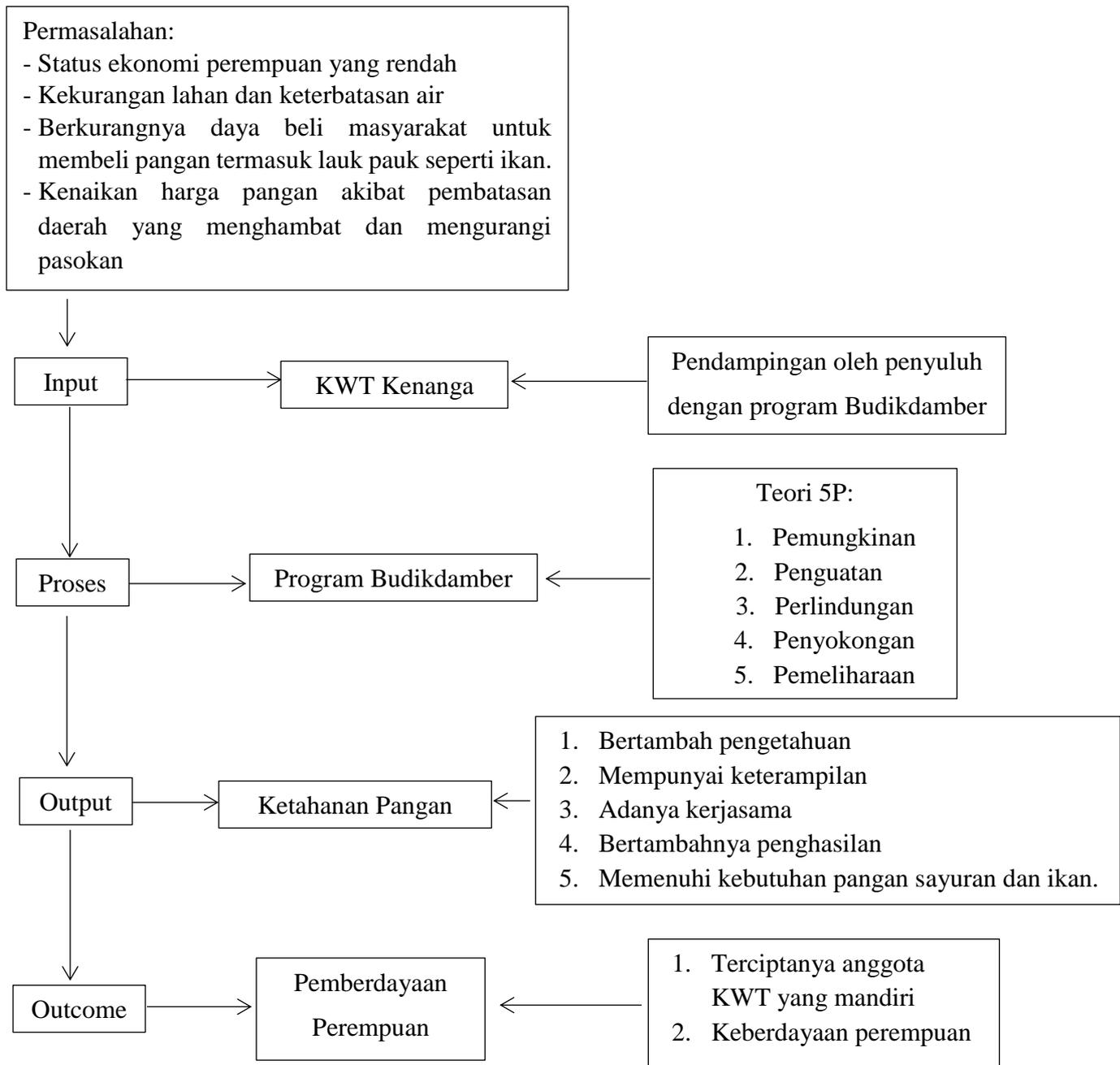
- e. Husna Ni'matul Ulya tahun 2021 dengan judul Pemulihan Perekonomian Jawa Timur Di Masa Pandemic Covid-19 Melalui Sistem Pertanian Terpadu (SPT) Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budikdamber merupakan alternatif pemanfaatan sumber daya yang ada dan memaksimalkan pemanfaatan lingkungan yang sama dalam dua sistem pertanian. Selain itu mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan juga menjual hasil pertanian untuk menambah pendapatan keluarga. Pemberdayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Menurut Sugiyono (2013 hlm 283) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pemikiran yang baik secara teoritis menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Ide awal yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk memberdayakan perempuan. Dimana pemberdayaan perempuan menjadi isu penting dalam program dan orientasi pembangunan nasional. Setelah dikuatkan, masyarakat menjadi aktor dan penentu pembangunan.

Pada kerangka konseptual ini menjelaskan teori dan hubungan dari berbagai variabel yang akan diteliti. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana proses Pemberdayaan perempuan melalui program Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) dalam upaya ketahanan pangan. Peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah rendahnya status ekonomi perempuan, minimnya lahan dan keterbatasan air, penurunan daya beli masyarakat untuk membeli pangan, termasuk lauk pauk seperti ikan, dan kenaikan harga pangan akibat pembatasan wilayah yang mempersulit distribusi dan mengurangi pasokan.

Yang menjadi *input* didalam penelitian ini adalah Kelompok Wanita Kenanga yang didalamnya ada Penyuluh, Ketua dan juga anggota yang turut berperan dalam proses pemberdayaan perempuan ini. Proses dari penelitian ini adalah dengan berlandaskan pada teori yang disampaikan oleh Edi Suharto yaitu dikenal dengan 5P : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. *Output* dari penelitian ini adalah terciptanya ketahanan pangan di keluarga. Sedangkan *outcome* nya adalah terciptanya perempuan yang berdaya dan bisa hidup mandiri.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

#### **2.4 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana proses pemberdayaan perempuan pada Kelompok Wanita Tani Kenanga melalui program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) untuk pemenuhan gizi keluarga di Desa Nyanggahurip Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya?